



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BOMBIT AGUS MULYO**
2. Jabatan : **KEPALA SUBAUDITORAT**
3. NHK : **199280**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **1.054.710.476**

1. Tanah Seluas 6340 m2 di KAB / KOTA LUMAJANG, WARISAN Rp. 152.064.000
2. Tanah Seluas 4250 m2 di KAB / KOTA LUMAJANG, HASIL SENDIRI Rp. 59.388.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 510 m2/48 m2 di KAB / KOTA LUMAJANG, WARISAN Rp. 14.916.000
4. Tanah Seluas 7280 m2 di KAB / KOTA LUMAJANG, WARISAN Rp. 146.480.000
5. Tanah Seluas 10087 m2 di KAB / KOTA LUMAJANG, WARISAN Rp. 201.740.000
6. Tanah Seluas 768 m2 di KAB / KOTA LUMAJANG, WARISAN Rp. 20.752.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/90 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 459.370.476

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **65.000.000**

1. MOBIL, KIA CARENS MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VEGA ZR SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **---**

D. SURAT BERTHARGA

Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **228.322.771**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.348.033.247
III. HUTANG	Rp.	300.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.048.033.247

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.